UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Kekuasaan, Pengetahuan, dan Politik Kebudayaan : Analisis Govermentality Kebijakan Keistimewaan dalam Dokumen RPJPD DIY 2025-2045
Agung Kresna Bayu, Amelia Maika, S.Sos., MA., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii

BAB I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Manfaat Penelitian 6
1.5. Penelitian Terdahulu 7
1.6. Tinjauan Pustaka 16
1.6.1. Kekuasaan/Pengetahuan 16
1.6.2. Politik Kebudayaan 17
1.6.3. Keistimewaan DIY 19
1.7. Landasan Teori 21
1.8. Metode penelitian 23
1.8.1. Jenis Penelitian 23
1.8.2. Desain Penelitian 24

BAB II Kebijakan Keistimewaan dalam Dokumen RPJPD DIY 2025-2045 34
2.1. Tinjauan Umum RPJPD DIY 2025-2045 34
2.2. Landasan Filosofis dan Yuridis Keistimewaan DIY 36
2.3. Lima Kewenangan Urusan Keistimewaan DIY 37
2.4. Integrasi Keistimewaan ke Dalam Visi dan Misi RPJPD DIY 2025-2045 40
2.5. Isu Strategis dan Arah Kebijakan Keistimewaan DIY 2025-2045 41

BAB III Genealogi Keistimewaan DIY 44
3.1. Produksi Legitimasi Kasultanan Yogyakarta 44
3.2. Rekontruksi Keistimewaan dalam Negara Republik 45
3.3. Institusionalisasi Keistimewaan sebagai Teknologi Pemerintahan 47
3.4. Institusionalisasi Keistimewaan sebagai Teknologi Pemerintahan 49

Kekuasaan, Pengetahuan, dan Politik Kebudayaan : Analisis Govermentality Kebijakan Keistimewaan dalam Dokumen RPJPD DIY 2025-2045
Agung Kresna Bayu, Amelia Maika, S.Sos., MA., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB IV Konstruksi Kebijakan Keistimewaan dalam Dokumen RPJPD DIY 2025-2045 52
4.1. Legitimasi Kebijakan dan Konstitusi Keistimewaan DIY 52
4.2. Legitimasi Historis Keistimewaan DIY 54
4.3. Legitimasi Kultural Keistimewaan DIY 55
4.4. Tujuan Keistimewaan dan Pembangunan Jangka Panjang DIY 59
4.5. Subjek Ideal Keistimewaan DIY 61
4.6. Konstruksi Wacana Keistimewaan 63

BAB V Analisis *Governmentality* Kebijakan Keistimewaan dalam Dokumen RPJPD DIY 2025-2045 66
5.1. Rasionalitas Pemerintahan 66
5.2. Teknologi Produksi Kebudayaan sebagai Objek Intervensi dan Perancangan Realitas 67
5.3. Teknologi Sistem Tanda Konstruksi Simbolik dan Rezim Kebenaran Keistimewaan 70
5.4. Teknologi Kekuasaan Instrumen Kalkulatif, Regulasi Spasial, dan Disiplin Institusional 71
5.5. Teknologi Diri Internalisasi Norma dan Pembentukan Manusia Yogyakarta 2045 74

BAB VI Analisis *Eventalization* Kebijakan Keistimewaan dalam Dokumen RPJPD DIY 2025-2045 79
6.1. Merusak Kejelasan dan Naturalisasi Kebijakan Keistimewaan DIY 79
6.2. Multiplikasi Kausalitas Hubungan Wacana Keistimewaan dan Kepentingan Elit 80
6.3. Kontigensi Sejarah dan Kontruksi Politik Kebijakan Keistimewaan DIY 81
6.4. Proyek Politik Menuju Manusia Yogyakarta 82

BAB VII Kesimpulan dan Saran 85
7.1. Kesimpulan 85
7.2. *Caveats* dan Batas Intrepretasi Penelitian 86
7.3. Saran 87

Daftar Pustaka 90
Lampiran 101